



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 14 September 2017

Halaman: 2

Media massa : MERAPI Hari : Kamis Tanggal : 14 - 09 - 2017 Halaman : 2

Walikota: Taati Moratorium Hotel

UMBULHARJO (MERAPI) - Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti meminta semua pihak menaati peraturan moratorium atau pembatasan pendirian hotel hingga Desember 2017. Haryadi belum bisa memastikan apakah moratorium tersebut akan dilanjutkan atau tidak.

Haryadi pun enggan memberikan tanggapan apakah kebijakan moratorium akan terus dilanjutkan, ketika sampai batas waktu Desember 2017. Sedangkan saat ini masih bulan September, sehingga kebijakan moratorium izin pembangunan hotel baru masih berlaku. "Saya minta semua pihak mentaati, bahwa moratorium hotel masih berlaku dan baru akan selesai Desember 2017," kata Haryadi, Rabu (13/9).

Dia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya, terutama dalam menegakkan peraturan yang ada. Terkait adanya proyek pembangunan tak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) yang rencana awal untuk hotel di Jalan Ipd Tut Harsono pihaknya akan mengecek dahulu.

"Nanti kita lihat dulu. Pemerintah tidak mengancam. Pemerintah itu fungsinya melayani masyarakat. Kalau nanti itu ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, ada pihak yang melaksanakan sanksinya," terangnya.

Seperti diketahui ada proyek pembangunan di Jalan Ipd Tut Harsono yang pada Januari 2017 pernah disegel Satpol PP Kota Yogyakarta karena IMB tak sesuai pengajuan.

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan setempat juga belum menerbitkan IMB pembangunan proyek itu karena berkaitan dengan kebijakan moratorium izin pembangunan hotel baru. Hal terbaru, pengembang proyek di Jalan Ipd Tut Harsono itu mengajukan IMB pondokan. Sebelumnya Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Setiyono mengutarkan masih mencermati pengajuan IMB pondokan itu dan belum menerbitkan izin.

Menurutnya bisa saja perubahan pengajuan izin dari sebelumnya pembangunan hotel ke pondokan bisa dilakukan selama memenuhi persyaratan dan ren-

cana tata ruang wilayah. Tapi jika di lapangan sudah ada aktivitas pembangunan dipastikan melanggar karena membangun sebelum ada izin.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005